



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

DAMPAK KENAIKAN BBM

**BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme
dan Neokolonialisme**
S. Aminah

**Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi
dan Pergeseran Peran Perempuan**
Bagong Suyanto

**Ancaman Meluasnya Kemiskinan
akibat Kenaikan BBM**
Karnaji

**Kebijakan Kesehatan di Indonesia :
Antara Market Approach dan Social Equity Model
(Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)**
Adri Patton

**Personal Influence and Power Distance:
Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising
Public Relations Practices in Asian Countries**
Ratih Puspa

**Analisis Daya Dukung Gua
untuk Pengembangan Ekowisata
(Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)**
Chafid Fandeli, Tjahyo Nugroho Adji

Pembangunan Ekowisata di Indonesia
Nur Emma Suriani, Nurdin Razak

**Resensi Buku
Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku**
Doddy S. Singgih

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 03 1-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Apabila membicarakan kenaikan BBM, banyak pakar diberbagai forum diskusi telah menjelaskan dan menegaskan bahwa efek yang ditimbulkan sangat multidimensional bahkan kehadiran kenaikan BBM dapat berpengaruh di kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, keamanan, hukum, sosial. Bahkan jauh sebelum kebijakan kenaikan BBM diberlakukan para analis ekonomi meramalkan ambruknya perekonomian masyarakat hanya tinggal menunggu waktu saja.

Efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM di pasaran bagaimana pun membuat masyarakat miskin makin terhimpit tanpa bisa melakukan reserve untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Ketika harga sejumlah barang kebutuhan pokok mulai merambat naik, sementara perkembangan sektor riil justru tengah lesu, maka yang terjadi kemudian adalah beban baru yang memberatkan keluarga-keluarga miskin di desa-desa miskin yang sehari-harinya sudah terbiasa hidup pas-pasan. Alih-alih kebijakan pencabutan subsidi BBM bakal membuat jumlah penduduk miskin berkurang seperti diinginkan pemerintah, yang terjadi di lapangan pasca kenaikan harga BBM adalah beban baru yang mesti ditanggung penduduk miskin menjadi makin berat. Dalam kenyataan tidak jarang terjadi penduduk yang semula miskin menjadi makin miskin dan berkekurangan karena mereka makin tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang makin berat.

Seperti biasanya, dengan dalih untuk mengurangi beban APBN yang semakin berat –karena harga minyak dunia mulai melambung di atas ambang psikologis– di satu sisi dan membantu masyarakat miskin di sisi lain, pemerintah mulai mengeluarkan jurusnya untuk meredam kemarahan masyarakat miskin dengan program BLT (bantuan langsung tunai) hasil dari dana kompensasi kenaikan BBM. Meskipun hanya Rp 300.000 per tiga bulan, untuk mengentas masyarakat miskin tentu saja dana sebesar itu belum cukup membantu meringankan beban masyarakat, karena bahan pokok sudah mulai naik lebih dahulu bahkan sebelum pengumuman kenaikan BBM disosialisasikan oleh pemerintah. Sekali lagi program-program yang digulirkan pemerintah acapkali bersifat karitatif dan tambal sulam sehingga tidak sampai menyentuh ke akar permasalahan sesungguhnya.

Berbagai artikel, serta hasil penelitian yang diolah redaksi tidak lain adalah berbagai efek yang terjadi semenjak digulirkannya kebijakan kenaikan BBM, selain terdapat berbagai tulisan di luar topik utama, antara lain: pada lingkup politik S. Aminah membahas BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme; kemudian Bagong Suyanto mengulas tentang Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan; Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM oleh Karnaji; Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Antara Market Approach dan Social Equity Model dipaparkan Adri Patton; Ratih Puspa menyajikan Personal Influence and Power Distance: Acknowledging Local Culture Influence In Conceptualising Public Relations Practices In Asian Countries; Analisis Daya Dukung Gua untuk

Pengembangan Ekowisata oleh Chafid Fandeli dan Tjahyo Nugroho Adji; Nur Emma Suriani dan Nurdin Razak membahas tentang Pembangunan Ekowisata di Indonesia serta resensi buku Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku oleh Doddy Sumbodo Singgih.

Harapan redaksi semoga keberadaan *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemecahan masalah sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide demi perbaikan proses pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2006:
Agenda Permasalahan Tahun 2006

BBM DALAM PERGULATAN SKENARIO NEOLIBERALISME DAN NEOKOLONIALISME

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

BBM dalam Pergulatan Skenario Neoliberalisme dan Neokolonialisme

S. Aminah

1

Dampak Industrialisasi Migas terhadap Eksistensi dan Pergeseran Peran Perempuan

Bagong Suyanto

15

Ancaman Meluasnya Kemiskinan Akibat Kenaikan BBM

Karnaji

27

Kebijakan Kesehatan di Indonesia :

Antara Market Approach dan Social Equity Model (Perspektif Ekonomi Politik Kebijakan Publik)

Adri Patton

41

Personal Influence and Power Distance:

Acknowledging Local Culture Influence in Conceptualising Public Relations Practices in Asian Countries

Ratih Puspa

57

Analisis Daya Dukung Gua untuk Pengembangan Ekowisata (Studi Kasus: Gua Gong dan Gua Tabuhan, Kabupaten Pacitan)

Chafid Fandeli & Tjahyo Nugroho Adji

67

Pembangunan Ekowisata di Indonesia

Nur Emma Suriani & Nurdin Razak

81

Resensi Buku

Penghakiman Massa: Kajian atas Kasus dan Pelaku

Doddy S. Singgih

95

ANCAMAN MELUASNYA KEMISKINAN AKIBAT KENAIKAN BBM

Karnaji

Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unair

Abstract

"Domino effect" caused by the increase of fossil fuel makes impecunious society more and more powerless. When several daily commodities start to go up, whereas growth of real sector is deep eased, hence people who live in impecunious country sides will have new burden. Displacement policy of fossil fuel subsidy will make the amount of impecunious resident decreased like what the government wants. In fact, what really happens in our society is that post increase of fossil fuel is a new burden for impecunious family. Impecunious family becomes more and more impecunious because they are no longer able to fulfill their daily needs.

Keywords: *impecunious, burden*

Kendati berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas kemiskinan, tetapi jumlah penduduk miskin, terutama di berbagai daerah pedesaan dari tahun ke tahun relatif tidak banyak berubah, bahkan dalam beberapa kasus cenderung naik. Untuk tahun 2005 ini, meski belum diketahui dan belum ada data yang *up to date* tentang jumlah terakhir penduduk miskin yang ada. Namun, akibat keputusan pemerintah menaikkan harga BBM awal bulan April 2005 diduga akan menyebabkan meluasnya kembali perkembangan jumlah penduduk miskin di berbagai daerah. Pemerintah sendiri sebetulnya bukan tidak menyadari bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan tekanan kebutuhan dan beban yang mesti

ditanggung masyarakat miskin menjadi makin berat. Di tengah kondisi situasi krisis yang belum sepenuhnya pulih, tentu kenaikan harga BBM ini akan menjadi pukulan susulan yang tidak mustahil kembali memerosok masyarakat miskin dalam beban krisis jilid kedua.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi agar kenaikan harga BBM tidak memberatkan masyarakat miskin, pemerintah telah merancang sebuah skema penyelamatan berupa program kompensasi BBM untuk masyarakat miskin. Total dana kompensasi BBM yang disediakan untuk masyarakat miskin sebesar 17,9 triliun rupiah. Lebih dari sekadar meringankan beban masyarakat miskin, pemerintah dengan didukung sejumlah intelektual yang bergabung dalam

Freedom Institute bahkan memprediksi (mengklaim?) keputusan menaikkan harga BBM plus program kompensasi BBM akan membuat angka kemiskinan menjadi turun. Dalam simulasi BPS, angka kemiskinan semula 16,25 persen diperkirakan akan naik menjadi 16,43 persen jika harga BBM naik tanpa ada dana kompensasi. Tetapi, angka kemiskinan justru diprediksi akan turun menjadi 13,87 persen jika kenaikan harga BBM dibarengi dengan program kompensasi yang ditujukan khusus kepada masyarakat miskin.

Menurut penjelasan pemerintah, dari sekitar 36 juta penduduk miskin yang ada saat ini, diperkirakan lewat program kompensasi BBM per orang akan mendapat 250 ribu, sehingga jika satu keluarga sekitar 3-4 orang, maka mereka akan mendapat subsidi 750 ribu sampai dengan 1 juta rupiah. Padahal dampak kenaikan BBM diperkirakan hanya sekitar 20 ribu per bulan atau 240 ribu per tahun per orang, sehingga kenaikan harga BBM jika kemudian dikompensasi dengan program subsidi beras dan SPP, justru akan menurunkan penduduk miskin. Alasannya, jika dana kompensasi diberikan dalam bentuk beras murah dan SPP, daya beli penduduk miskin justru akan meningkat 5,0 persen dan kelompok hampir miskin naik 0,69 persen. Benarkah demikian? Dalam hitungan statistik, prediksi bahwa kenaikan BBM plus program kompensasi justru akan menurunkan angka kemiskinan sepintas mungkin masuk nalar. Tetapi, apakah realitas sosial yang dihadapi masyarakat miskin dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa dipahami sekadar lewat angka dan hitungan statistik belaka?

Sebuah keluarga tukang becak atau

buruh nelayan, misalnya, gara-gara BBM naik dan harga kebutuhan pokok tiba-tiba melambung, jangan kaget jika mereka kemudian terpaksa harus utang ke sana-sini, dan ujung-ujungnya bahkan terpaksa harus kehilangan *asset* produksinya karena ambang batas kerentanan mereka tidak lagi mampu mentoleransi beban hidup yang makin menjejaskan. Tambahan pengeluaran sekitar 250 ribu setahun, bagi keluarga yang relatif mapan barangkali bukan masalah yang terlalu merisaukan. Tetapi, bagi keluarga miskin, apalagi yang berada pada golongan paling miskin, tambahan pengeluaran sekitar 10-20 ribu per bulan tidak mustahil akan menyebabkan mereka makin terpuruk. Ibaratnya seperti orang yang berdiri di air sebatas dagu, maka sekecil apa pun riak yang melanda, niscaya itu sudah cukup membuat mereka mati tenggelam. Jadi, alih-alih mengurangi jumlah penduduk miskin, kenaikan setiap sen harga BBM, sebetulnya akan tetap membebani masyarakat miskin, dan bukan tidak mungkin akibat kenaikan harga BBM justru akan melahirkan orang-orang miskin baru.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa perubahan apa pun yang terjadi, termasuk kenaikan biaya produksi yang mesti ditanggung kalangan pengusaha akibat kenaikan harga BBM, niscaya ujung-ujungnya akan dibebankan kepada orang miskin, baik sebagai buruh atau sebagai konsumen. Dengan posisi yang relatif tak berdaya dan rentan, niscaya tidak banyak pilihan yang dapat diambil masyarakat miskin, kecuali menerima nasib bahwa struktur sosial di sekitarnya memang *rigid* (kaku), dan tidak memungkinkan mereka untuk melakukan mobilitas vertikal. Berharap bahwa program kompensasi BBM akan sedikit

meringankan beban yang bakal ditanggung masyarakat miskin barangkali masih masuk akal untuk dimengerti. Tetapi, perlu disadari bahwa kenaikan harga BBM jelas tidak paralel dengan turunnya angka kemiskinan, apalagi kenaikan BBM dan dana kompensasi diklaim sebagai solusi untuk mengatasi dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Untuk memberantas kemiskinan, lebih dari sekadar program kompensasi BBM, yang dibutuhkan sesungguhnya adalah komitmen dan substansi program yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat miskin. Jadi, yang perlu kita tunggu pasca kenaikan harga BBM adalah sejauhmana sebetulnya kesungguhannya pemerintah untuk membantu upaya pemberdayaan masyarakat miskin, dan sekaligus mengurangi polarisasi antarkelas yang selama ini sudah terlanjur menyolok mata.

Ancaman Merebaknya Kemiskinan

Di muka telah dijelaskan bahwa sejak pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah agar dampak kenaikan harga BBM itu tidak makin membebani masyarakat miskin, dan sekaligus terus berusaha memberdayakan kembali kegiatan produktif penduduk miskin. Tetapi, kalau mau jujur hingga kini hasilnya boleh dikata masih belum maksimal. Dampak kenaikan harga BBM, diduga bukan cuma menyebabkan daya beli masyarakat merosot, harga barang dan kebutuhan pokok kembali naik, dan terjadi tekanan krisis gelombang kedua, tetapi juga menyebabkan terjadinya lonjakan jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang cukup tajam. Skala

dan merebaknya dampak dari kenaikan harga BBM boleh dikata telah menyentuh lapisan masyarakat di pelosok wilayah mana pun, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah sendiri sebenarnya bukan bersikap lepas tangan terhadap berbagai kesulitan yang dialami masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Selain menjaga agar laju inflasi tidak makin meningkat, pemerintah melalui dana kompensasi BBM dan berbagai program penanggulangan kemiskinan juga telah mengucurkan sejumlah besar dana dan menggulirkan berbagai program yang pada intinya bertujuan untuk mencegah agar masyarakat miskin tidak makin terpuruk. Namun, ibarat penyakit kronis, biang terjadinya kemiskinan yang berkepanjangan tampaknya tetap nyaris tak tersentuh, atau bahkan tidak pernah atau tidak mampu untuk disentuh. Kinerja perekonomian di berbagai wilayah tak kunjung membaik, bahkan terkesan menjadi semakin meluas dan mendalam.

Berbagai hasil kajian menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin adalah. Pertama, menurunnya pendapatan riil penduduk. Kedua, naiknya jumlah pengangguran, terutama di wilayah atau kantong-kantong kemiskinan. Ketiga, kenaikan inflasi, terutama untuk kelompok pangan yang jauh lebih tinggi dari tingkat inflasinya sendiri. Diperkirakan untuk harga beras telah meningkat hampir dua kali lipat lebih. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat desa maupun kota dan mendorong mereka masuk ke dalam kelompok penduduk miskin. Bagi masyarakat pedesaan, diakui atau tidak situasi pasca kenaikan harga BBM sangatlah merugikan. Dari hasil

pengamatan langsung di lapangan diketahui bahwa di berbagai pedesaan saat ini telah terjadi proses pemiskinan akibat melambungnya harga kebutuhan pokok dan bertambahnya jumlah pengangguran. Di desa-desa selama ini keluarga-keluarga miskin umumnya hanya mampu bertahan hidup secara pas-pasan. Mereka biasanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara mengutang ke warung-warung, mengurangi konsumsi, makan tanpa lauk-pauk atau bahkan terpaksa menjual sebagian barang yang mereka miliki, seperti sepeda, mesin jahit, pakaian atau perhiasan. Jika ada salah seorang anggota keluarga yang sakit — entah itu anak atau orang tua — niscaya keluarga miskin itu akan makin menderita, dan bahkan tidak mustahil *collaps*.

Dalam laporan Bank Dunia yang berjudul “*Indonesia, Maintaining Stability, Deepening Reforms (2003)*” dikatakan bahwa salah satu kelemahan pemerintah Indonesia adalah pada ketidakkonsistenan dalam kebijakan pengurangan kemiskinan. Data yang ada dalam laporan lembaga keuangan multinasional itu menunjukkan bahwa Indonesia memang berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 27 persen pada puncak krisis pada 1999 menjadi hanya 16 persen pada Februari 2002. Pengurangan ini terjadi karena menguatnya rupiah membuat harga makanan naik terbatas dan membaiknya tingkat upah. Upah di sektor manufaktur pada pertengahan 2002, misalnya, lebih tinggi 35 persen dibandingkan dengan posisi 1996 (Tempo, Edisi 20-26 Januari 2003). Cuma, yang patut disayangkan kecenderungan yang menggembirakan ini ternyata hanya bersifat sementara. Banjir yang terjadi pada awal tahun 2002 menyebabkan harga

bahan makanan naik dan tingkat kemiskinan kembali meningkat. Dalam survei terbatas terlihat bahwa indeks kemiskinan naik dari 13,2 persen pada Februari 2001 menjadi 14,5 persen pada Februari 2002. Di sisi lain: pengeboman di Bali dan teror bom di Hotel JW Marriott yang terjadi pertengahan tahun 2003 lalu juga makin memperparah keadaan.

Ketika Indonesia sudah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 15 persen pada pertengahan 2002, peristiwa bom Bali menyebabkan angka tersebut terkoreksi menjadi 15,5, persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pengeboman di Bali diprediksi Bank Dunia akan menambah sekitar satu juta orang ke dalam belunggu kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tak cuma membuat orang miskin bertambah banyak. Jumlah pengangguran terbuka pun meningkat. Mengutip laporan Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran pada pertengahan 2002 sudah mencapai 8,4 juta, 61 persennya berusia 15-24 tahun. Sementara itu, jumlah setengah pengangguran diperkirakan mencapai sekitar 25 juta.

Dampak Kenaikan BBM

Meski secara ekonomis, pengurangan subsidi BBM merupakan langkah taktis agar tidak membebani APBN dan sekaligus mencegah agar subsidi BBM tidak dinikmati dan jatuh ke tangan yang salah. Tetapi, efek domino yang ditimbulkan akibat kenaikan harga BBM di pasaran bagaimana pun membuat masyarakat miskin makin terjejas. Ketika harga sejumlah barang kebutuhan pokok mulai merambat naik, sementara perkembangan sektor riil justru tengah

lesu, maka yang terjadi kemudian adalah beban baru yang memberatkan keluarga-keluarga miskin di desa-desa miskin yang sehari-harinya sudah terbiasa hidup pas-pasan. Seperti diakui separuh lebih responden penelitian ini, bahwa dibandingkan sebelum kenaikan harga BBM, kondisi sosial-ekonomi mereka umumnya lebih buruk (28,5%), dan bahkan 28% menyatakan jauh lebih buruk. Hanya 10,5% responden yang menyatakan kondisi sosial-ekonominya sekarang lebih baik, dan 1% menyatakan jauh lebih baik. Sementara itu, sebanyak 37% responden mengaku tidak ada perbedaan kesejahteraan mereka antara sebelum maupun sesudah kenaikan harga BBM. Bisa dibayangkan, ketika besar penghasilan tidak bertambah, atau bahkan malah makin berkurang karena usaha yang ditekuni makin lesu, maka apa yang bisa diharapkan keluarga-keluarga miskin untuk melangsungkan kehidupannya, kecuali sekadar bertahan hidup dengan standar yang lebih rendah daripada sebelumnya?

Menurut pengakuan 200 keluarga miskin yang diteliti, 28,5% responden menyatakan bahwa total pendapatan yang diperoleh sebetulnya kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus merangkak naik, dan bahkan 36,5% responden menyatakan sangat kekurangan. Tidak ada satu pun responden mengaku kehidupannya sekarang lebih baik daripada sebelum harga BBM naik. Sebanyak 14% responden menyatakan taraf kehidupannya termasuk cukup, dan 21% yang lain menyatakan pas-pasan. Jadi, alih-alih kebijakan pencabutan subsidi BBM bakal membuat jumlah penduduk miskin berkurang seperti diinginkan pemerintah, yang terjadi di lapangan pasca kenaikan harga BBM adalah beban baru yang mesti ditanggung penduduk miskin menjadi makin berat. Dalam kenyataan tidak jarang terjadi penduduk yang semula miskin menjadi makin miskin dan berkekurangan karena mereka makin tidak sanggup memenuhi kebutuhan hidup yang makin berat.

Untuk saat ini, sebagian besar

Tabel 1
Kondisi Sosial-Ekonomi Keluarga Miskin Pasca Kenaikan BBM (N=200)

Total pendapatan apakah cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	Sangat kurang	36,5%
	Kurang	28,5%
	Pas-pasan	21,0%
	Cukup	14,0%
	Lebih dari cukup	0,0%
Kondisi ekonomi saat ini dibanding sebelum kenaikan BBM	Jauh lebih buruk	28,0%
	Lebih buruk	23,5%
	Sama saja	37,0%
	Lebih baik	10,5%
	Jauh lebih baik	1,0%
Upaya yang biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika mengalami tekanan kemiskinan	Dari penghasilan rutin	75,5%
	Dari tabungan	3,5%
	Utang ke kerabat	4,5%
	Utang ke orang lain	7,5%
	Utang ke warung/took	11,0%

(75,5%) keluarga miskin yang diteliti memang mengaku masih bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup minimal mereka dari penghasilan rutin yang diperolehnya. Namun demikian, tanda-tanda bahwa penghasilan yang rutin itu mulai tidak mencukupi lagi bukannya tidak kelihatan. Ketika harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, sementara penghasilan yang diperoleh tetap atau malah berkurang, maka tidak bisa tidak yang terjadi kemudian adalah mulai bergesernya keseimbangan: masyarakat miskin yang ditemui di lapangan tidak lagi mengaku hidupnya pas-pasan, tetapi mulai berkekurangan.

Sepanjang hidup berlangsung normal atau wajar-wajar saja, memang tidak terlalu banyak masalah yang timbul. Tetapi, lain soal ketika keluarga miskin itu mulai mengalami tekanan kebutuhan yang sifatnya mendadak, seperti pada saat anak jatuh sakit atau mereka harus mengeluarkan uang di luar kebutuhan rutin untuk makan? Pada saat kebutuhan hidup bertambah, maka jangan heran jika keluarga-keluarga miskin yang ditemui terpaksa menggantungkan pada belas-kasihan orang lain, entah utang ke kerabat (4,5%), utang ke orang lain (7,5%) atau utang ke warung dan toko terdekat untuk memenuhi kebutuhan hidup (11%). Bagi masyarakat miskin di desa, utang adalah salah satu mekanisme untuk bertahan hidup yang biasa dikembangkan, dan tidak jarang terjadi jika tekanan kemiskinan benar-benar sudah kronis, maka yang mereka lakukan adalah semacam mekanisme "gali lubang tutup lubang".

Walau tidak separah seperti masa ketika situasi krisis multidimensional menyergap dan merambah ke berbagai

pelosok, bukan berarti kenaikan harga BBM yang terjadi di awal tahun 2005 sama sekali tidak berdampak bagi masyarakat miskin. Studi ini menemukan ada sejumlah akibat yang diderita dan terpaksa ditanggung keluarga miskin pasca kenaikan harga BBM. Yang paling menyolok, menurut responden adalah dampak kenaikan BBM terhadap kemampuan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebanyak 45,5% responden menyatakan bahwa akibat kenaikan BBM benar-benar sangat terasa dan menyulitkan mereka untuk melangsungkan kehidupannya, dan sebanyak 40% menyatakan cukup terasa. Hanya 11,5% responden yang menyatakan kenaikan BBM tidak berdampak bagi kelangsungan kehidupan mereka.

Dampak lain dari kenaikan BBM adalah pada kelangsungan usaha yang ditekuni keluarga miskin. Menurut responden, sejak pemerintah menaikkan harga BBM, sangat terasa (23,5%) bahwa usaha yang mereka tekuni kemudian mengalami kemunduran. Sebanyak 62,5% responden yang lain menyatakan cukup terasa. Meski dampak yang terjadi tidak bersifat langsung, tetapi ketika harga bahan-bahan produksi naik, dan pasar juga pelan-pelan mengendur karena daya beli masyarakat menurun, maka pelan-pelan dirasakan usaha yang ditekuni keluarga miskin mulai kehilangan gairah: jumlah pembeli berkurang, jam kerja berkurang, dan omzet pun menurun. Bahkan, ada sebagian responden yang mengaku usahanya benar-benar *bangkrut*, dan sebagian yang lain juga ada yang mengaku terpaksa di-PHK majikannya karena usahanya *collapse*.

Tabel 2
Akibat yang Ditanggung Keluarga Miskin Pasca Kenaikan BBM

Akibat	Keterangan				Jumlah
	Sangat Terasa	Cukup Terasa	Tidak Terasa	Tidak Menjawab	
Anak-anak terpaksa putus sekolah	5,5	31,5	51,5	11,5	100
Kehilangan pekerjaan	5,0	38,0	49,5	7,5	100
Usaha yang ditekuni mengalami kemunduran	23,5	62,5	10,5	3,5	100
Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari	45,5	40,0	11,5	3,0	100
Terganggu kesehatan anggota keluarga	12,0	33,0	50,0	5,0	100
Utang meningkat	15,0	58,0	21,0	6,0	100
Anggota keluarga terpaksa migrasi untuk mencari kerja	1,5	37,0	47,0	14,5	100

Berbeda dengan keluarga yang secara ekonomi mapan, sekali pun mengalami tekanan kebutuhan yang sifatnya mendadak, umumnya mereka masih mampu mengatasinya karena memiliki penyangga ekonomi yang cukup. Tabungan dan bahkan penghasilan rutin bulanan yang dimiliki biasanya sudah cukup untuk mengatasi berbagai tekanan dan kebutuhan yang mungkin tidak terduga. Tetapi, bagi keluarga miskin di pedesaan, mereka acapkali diibaratkan seperti “orang yang berdiri di kedalaman air sebatas dagu”. Sekecil apapun riak menimpa mereka, itu semua sudah cukup mematikan dan menenggelamkan mereka ke dalam berbagai tekanan kemiskinan, sehingga salah satu cara yang biasanya dikembangkan untuk bertahan hidup adalah utang. Seperti diakui responden penelitian ini, bahwa pasca kenaikan harga BBM, sebanyak 58% responden menyatakan utang mereka cukup terasa meningkat, dan bahkan 15% responden menyatakan utang mereka sangat terasa meningkat.

Dampak lain yang terasa ironis dan dialami keluarga miskin di Kabupaten Bojonegoro pasca kenaikan harga BBM

adalah ketika tekanan kemiskinan yang mereka alami itu kemudian menimpa anak-anak. Dari 200 keluarga miskin yang diteliti, sekitar sepertiga lebih responden mengaku anak-anak mereka terpaksa putus sekolah karena tak kuat menanggung beban hidup yang makin berat. Meski pemerintah sebetulnya sudah mengalokasikan dana beasiswa dan bantuan subsidi biaya minimal kepada anak-anak sekolah. Tetapi, karena yang dihadapi keluarga miskin tidak sekadar kebutuhan dana untuk membiayai sekolah anak-anak mereka, maka cepat atau lambat anak-anak dari keluarga miskin ini pun terpaksa putus sekolah.

Studi ini menemukan, penyebab utama anak-anak keluarga miskin putus sekolah, karena fungsi anak bagi keluarga sebetulnya adalah sebagai salah satu sumber alternatif pencari nafkah yang penting, terutama ketika keluarga yang bersangkutan mengalami krisis dan tekanan kemiskinan yang menjejaskan. Dengan bekerja satu hari, seorang anak sebetulnya dapat memperoleh upah hingga 5-10 ribu rupiah dan itu sudah cukup untuk membiayai uang sekolah mereka. Tetapi, bagi anak-anak dari

keluarga miskin, sekolah dan bekerja adalah dua hal yang terasa berat jika harus mereka lakukan bersama-sama. Menurut hasil kajian Sukmadinata (1994), faktor utama penyebab anak putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau karena orang tua tidak mampu menyediakan biaya bagi sekolah anak-anaknya.

Di samping itu, tidak jarang terjadi orang tua meminta anaknya berhenti sekolah karena mereka membutuhkan tenaga anaknya untuk membantu pekerjaan orang tua. Di daerah pedesaan, selain di sektor pertanian dan perkebunan, biasanya anak-anak bekerja di sektor industri kecil, sektor informal dan sektor perdagangan tradisional. Jam kerja yang panjang, faktor kelelahan fisik, dan sejenisnya—ditambah lagi pengaruh lingkungan teman seusia yang rata-rata memang kurang perhatian kepada kegiatan belajar—adalah faktor gabungan yang menyebabkan anak-anak yang terpaksa bekerja acapkali prestasi belajarnya di sekolah relatif rendah, dan bahkan putus sekolah sebelum waktunya.

Untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya, ada banyak cara yang biasa dikembangkan keluarga miskin. Secara garis besar, studi ini menemukan ada dua cara yang acapkali dilakukan keluarga miskin untuk menyiasati keadaan. *Pertama*, adalah dengan cara mencari pekerjaan alternatif, dan bahkan jika perlu pergi keluar dari

desanya dan kemudian mengadu nasib untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar. Dari 200 keluarga miskin yang diteliti, hampir separuh responden mengaku terpaksa ada salah satu atau lebih anggota keluarganya yang terpaksa melakukan migrasi dan mencari pekerjaan di kota besar. Biasanya mereka bekerja di sektor informal kota atau kalau perempuan biasanya salah satu pekerjaan yang populer adalah sebagai pembantu rumah tangga.

Kedua, melakukan berbagai langkah penghematan, seperti mengurangi frekuensi makan dan menurunkan kualitas menu makanan atau mengurangi uang jajan sehari-hari keluarga. Di kalangan keluarga miskin, langkah penghematan yang populer dilakukan, terutama adalah mengurangi kualitas menu makanan. Dari 200 keluarga miskin, 40% responden mengaku sering melakukan hal ini, dan hanya 20,5% yang tidak pernah melakukannya. Sebanyak 39,5% mengaku kadang-kadang melakukan hal ini. Artinya, jika sebelumnya keluarga responden makan dengan lauk-pauk yang sederhana, maka setelah terjadi kenaikan harga BBM dan ketika harga kebutuhan barang di pasaran naik, maka yang dilakukan kemudian adalah menurunkan hingga ke titik terendah menu makanan yang mereka konsumsi sehari-hari.

Sebanyak 19% responden, bahkan

Tabel 3
Bentuk Penghematan yang Dilakukan Keluarga Miskin Pasca Kenaikan BBM

Akibat	Intensitas			Jumlah
	Sering	Jarang	Tidak Pernah	
Mengurangi frekuensi makan	19,0	43,0	38,0	100
Mengurangi kualitas menu makanan	40,0	39,5	20,5	100
Mengurangi uang jajan anak	7,5	50,0	42,5	100
Mengurangi uang jajan ayah	18,5	32,0	49,5	100
Mengurangi uang jajan ibu	18,5	31,0	50,5	100

mengaku mereka sering pula mengurangi frekuensi makan sehari-hari agar pengeluaran keluarga dapat dihemat – termasuk di sini mengurangi uang jajan. Jika sebelumnya lazim dilakukan orang-orang desa *ngopi* atau merokok, maka pasca kenaikan BBM hal itu dengan terpaksa harus mereka kurangi. Demikian pula uang jajan anak. Pendek kata, sepanjang penghasilan yang diperoleh turun atau berkurang, maka tidak bisa tidak mereka harus mengurangi pengeluaran dan melakukan berbagai langkah penghematan agar “tidak besar pasak daripada tiang”.

Strategi Kelangsungan Hidup: Di Tengah Terbatasnya Pilihan

Yang dimaksud strategi kelangsungan hidup atau mekanisme *survival* di sini adalah cara atau strategi yang dikembangkan keluarga-keluarga miskin dalam menyiasati tekanan ekonomi yang terjadi akibat situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Secara teoritis, ada banyak cara yang biasa dikembangkan keluarga-keluarga miskin untuk bertahan hidup dan menyiasati situasi krisis yang menimpa mereka. Seperti dikatakan Robert Chambers (1987), bahwa selain memiliki potensi-potensi individual yang mengejutkan, dukungan lingkungan sosial sekitar dan pranata-pranata yang hidup di komunitas masyarakat desa umumnya memiliki fungsi positif sebagai asuransi sosial untuk keluar dari tekanan yang menghimpitnya.

Memang, bila dikalkulasi di atas kertas, barangkali tidak akan pernah terbayangkan yang namanya keluarga-keluarga miskin di pedesaan mampu bertahan hidup menghadapi jejasan situasi

krisis yang berkepanjangan. Namun, dalam kenyataan sering terjadi kreativitas dan strategi untuk menyiasati krisis justru timbul begitu saja di lapangan: yang penting mereka dapat bertahan hidup sampai tekanan-tekanan yang menimpanya berkurang, dan syukur mereka dapat keluar dari situasi krisis tanpa harus kehilangan terlalu banyak aset-aset produksinya.

Studi ini menemukan, kiat pertama dan yang paling mudah —meski sebenarnya sangat terpaksa mereka lakukan— untuk menyiasati krisis adalah dengan melakukan berbagai menyederhanaan kegiatan konsumsi sehari-hari atau dalam bentuk mengurangi frekuensi makan, khususnya bagi orang tua yang sudah terbiasa menahan lapar. Sudah menjadi cara paling umum, apabila kondisi keuangan memang tidak memungkinkan, maka cara yang paling mudah dilakukan keluarga-keluarga miskin adalah makan seadanya. Meski tidak harus mengurangi frekuensi makan hingga titik minimal atau berpuasa, karena sebetulnya sebagian besar orang miskin sudah makan hanya 2 kali sehari, namun seperti sudah sedikit disinggung di muka bahwa tak sedikit keluarga miskin yang mengaku kalau mereka terpaksa menurunkan kualitas menu makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Dari 200 responden yang diteliti, 24% menyatakan bahwa pengetatan konsumsi adalah kiat yang paling mudah dilakukan jika tekanan kemiskinan terasa menjejaskan.

Sampai kegiatan penelitian ini dilakukan, memang belum pernah ditemui ada keluarga miskin di lokasi penelitian yang anaknya sakit busung lapar atau meninggal karena kurang gizi. Hanya saja, kecenderungan ke arah sana tidak

mustahil terjadi jika situasi krisis yang terjadi karena kenaikan harga BBM terus berkepanjangan. Di lingkungan komunitas pedesaan yang masih bisa bertahan hidup dengan mengandalkan hasil-hasil dari sektor pertanian dan perilaku subsistensi, seberapa pun kuat tekanan ekonomi yang dihadapi, mereka umumnya masih cukup kenyal karena dapat memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dari sebagian produk-produk pertanian yang dihasilkan dan pemanfaatan sumber daya alam setempat yang mendukung, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang dapat dipetik dari pekarangan sendiri.

Tetapi, lain soal jika di daerah responden ternyata hasil pertanian pun tidak lagi bisa diandalkan karena kondisi cuaca yang tidak menentu dan biaya saprodi yang harganya ikut melambung. Dari 200 responden yang diwawancarai, 44% menyatakan bahwa untuk saat ini sudah sulit untuk melakukan dan mengembangkan perilaku subsistensi seperti di masa lalu, dan bahkan 16% menyatakan sangat sulit.

Untuk sementara waktu ini, strategi yang dikembangkan keluarga-keluarga miskin agar mereka tidak tergilas krisis dan tekanan kemiskinan pasca kenaikan harga BBM adalah dengan cara bekerja lebih keras —menambah jam kerja sehari-hari (46%) atau mencoba mendayagunakan

anggota keluarga yang ada untuk mencari pekerjaan alternatif. Sebanyak 26,5% responden menyatakan bagi mereka relatif mudah meminta anggota keluarga untuk mencari pekerjaan alternatif, dan bahkan sebanyak 7% menyatakan sangat mudah.

Namun, untuk mengembangkan usaha sendiri ke lain sektor atau melakukan diversifikasi usaha, disadari responden tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan. Sebanyak 60% responden mengaku sulit melakukan diversifikasi usaha, dan bahkan 10% responden menyatakan sangat sulit. Selain keterbatasan ketrampilan dan wawasan yang dimiliki, tanpa didukung dengan aset atau modal yang cukup, jelas mustahil bagi keluarga miskin untuk dapat melakukan perubahan pengembangan mata pencaharian baru yang lebih menguntungkan.

Ibarat orang yang tengah berlomba lari, tentu sulit bagi keluarga miskin yang sejak awal sudah ketinggalan *start* puluhan kilo meter, tiba-tiba kini mereka dituntut untuk mengejar ketertinggalan itu dengan cara yang *instant*. Studi ini menemukan sekitar tiga per empat lebih responden umumnya tidak memiliki usaha alternatif atau toko/warung, modal, dan sepeda motor yang dapat mereka gunakan untuk mendukung usaha *survival* mereka. Apa yang dapat dilakukan oleh keluarga-

Tabel 4
Kiat Keluarga Miskin Menyiasati Situasi Krisis Pasca Kenaikan BBM

Kiat Menyiasati	Keterangan				Jumlah
	Sangat Sulit	Sulit Dilakukan	Mudah Dilakukan	Sangat Mudah	
Perilaku subsistensi	16,0	44,0	30,5	9,5	100
Diversifikasi usaha	10,5	60,0	26,5	3,0	100
Penambahan jam kerja	10,5	39,5	46,0	4,0	100
Pengetatan konsumsi	10,5	32,5	33,0	24,0	100
Pendayagunaan anggota keluarga untuk bekerja	10,5	56,0	26,5	7,0	100

keluarga yang secara sosial-ekonomi miskin itu jika sebagian besar dari mereka tidak memiliki asset produksi yang layak?

Seperti dikatakan Friedman (1979), akar penyebab dan pengertian kemiskinan sesungguhnya adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara yang dimaksud basis kekuasaan sosial itu menurut Friedman meliputi. Pertama, modal produktif atas asset, misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti *income* dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan.

Kalau berbicara soal cita-cita atau keinginan, sebenarnya hampir semua keluarga miskin yang ditemui berharap dapat segera keluar dari himpitan situasi krisis dan tekanan kebutuhan ekonomi pasca kenaikan BBM. Tetapi, di saat yang sama mereka juga sadar bahwa untuk mewujudkannya tidaklah semudah merencanakannya di atas kepala. Ketika responden ditanya kemungkinan mereka melakukan kiat-kiat tertentu untuk menyiasati krisis, sebagian besar menyatakan kesulitan untuk mewujudkannya. Sebanyak 15,5% menyatakan tidak mampu, dan bahkan sebanyak 43% responden dengan terusterang mengakui bahwa mereka jelas tidak mampu untuk hidup mandiri semata-mata hanya mengandalkan pada asset produksi yang dimilikinya karena jumlahnya sangat terbatas, dan bahkan tidak ada. Dari 200 keluarga miskin yang diwawancarai, hanya 1,5% responden yang yakin mampu hidup

mandiri tanpa dibantu pihak lain, dan sebanyak 23% responden menyatakan mungkin mampu.

Bagi warga masyarakat miskin yang kebanyakan kurang berpendidikan, tidak memiliki koneksi atau jaringan kerja, dan tidak pula memiliki asset produksi yang memadai, memang sebenarnya bisa dipahami jika dalam banyak kasus mereka terkesan apatis, bahkan fatalis. Hampir separuh responden (49,5%) mengakui bahwa dengan segala keterbatasannya peluang mereka untuk mencari pekerjaan alternatif adalah kecil, dan bahkan sangat kecil. Hanya 10,5% responden yang optimis bahwa mereka dapat mencari pekerjaan alternatif jika memang diperlukan.

Untuk memenuhi kebutuhan modal yang murah dan berbunga lunak, benar bahwa cukup banyak masyarakat miskin (48%) yang optimis akan dapat mencarinya, entah dari lembaga kredit formal atau informal. Tetapi, separuh lebih responden yang lain (52%) dengan jujur justru bersikap pesimis. Ketika ditanya kemungkinan penduduk miskin memperoleh atau mengakses bantuan modal usaha yang berbunga lunak, sebanyak 35% responden mengaku kemungkinannya kecil, dan bahkan 18% responden menyatakan kemungkinannya sangat kecil.

Studi ini juga menemukan bahwa sebagian besar responden (78%) mengaku tidak memiliki koneksi atau pihak-pihak tertentu yang bisa diposisikan sebagai patron untuk dijadikan tempat bersandar ketika mereka membutuhkan bantuan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, pada akhirnya memang banyak pilihan yang tersedia bagi keluarga miskin untuk menyiasati dan keluar dari tekanan kemiskinan yang menjejaskan mereka. Bagi keluarga miskin, mencari sumber-sumber

penghasilan alternatif, bagaimana pun bukanlah hal yang mudah, sehingga ketika mereka dihadapkan pada kebutuhan hidup yang tidak lagi bisa ditunda, maka yang seringkali dilakukan akhirnya adalah meminta bantuan kerabat (21,5%) atau utang —baik dengan bunga (19%) atau tanpa bunga (17,5%).

Kendati tidak dijelaskan bantuan apa yang dapat diperoleh keluarga miskin dari kerabatnya, tetapi menurut penuturan responden keberadaan kerabat bagaimana pun adalah semacam asuransi sosial yang sifatnya sangat fungsional untuk tempat melakukan *sambatan*. Berbeda dengan masyarakat di kota besar yang kebanyakan bertipe keluarga batih (*nuclear family*), di daerah pedesaan keluarga-keluarga yang tinggal umumnya lebih berpola somah (*extended family*) —di mana hubungan personal antar anggota kerabat masih sangat erat satu dengan yang lainnya.

Bagi keluarga-keluarga miskin di pedesaan, lingkungan sosial di sekitar mereka yang ramah dan bentuk hubungan yang masih dominan bersifat personal, dalam banyak hal harus diakui memiliki fungsi yang positif. Berbeda, misalnya dengan pola hubungan masyarakat kota yang cenderung bersifat kontraktual dan impersonal, di daerah pedesaan antara keluarga satu dengan yang lain umumnya saling kenal dengan baik, dan ada semacam rasa kebersamaan dan kohesi sosial yang masih kuat, sehingga meski pun tekanan situasi krisis menghantam bertubi-tubi, namun dengan penghematan, kreativitas dan dukungan pranata-pranata sosial di sekitarnya, mereka relatif masih mampu bertahan hidup.

Kalau dengan berhemat, mengencangkan ikat pinggang keluarga miskin tetap tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya, dan keberadaan kerabat serta patron-patron yang lain tidak lagi dapat diandalkan sebagai tempat bergantung, maka alternatif lain yang terpaksa dilakukan sebagian responden untuk tetap hidup adalah dengan cara menggadaikan barang, menjualnya atau berhutang. Bagi keluarga miskin, utang memang merupakan salah satu cara populer yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendadak.

Dari 200 responden yang diwawancarai, sebanyak 19% mengaku sering berutang dan 33,5% menyatakan cukup sering. Beberapa responden mengakui secara terbuka, bahwa di daerah pedesaan “sistem bon” —ambil barang dahulu, bayar kemudian— adalah hal yang biasa mereka lakukan. Seorang keluarga buruh tani, misalnya, mereka umumnya telah terbiasa pada hari-hari tertentu utang dulu ke warung-warung kecil tetangganya atau mengambil barang-barang kebutuhan dapur di toko yang ada di daerahnya, untuk kemudian mereka bayar pada saat menerima upah atau panen.

Terlepas sejauh mana mekanisme subsistensi dan penghematan konsumsi yang dikembangkan responden efektif untuk menyiasati krisis, tetapi yang jelas dengan cara yang mereka lakukan banyak keluarga miskin yang diwawancarai mengaku dapat bertahan hidup hingga sekarang. Kalau dikalkulasi secara rasional, dengan penghasilan yang pas-pasan atau bahkan minus, logikanya keluarga responden sudah *collapse* atau tidak lagi hidup karena mereka sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari pasca kenaikan harga BBM. Tetapi, dengan melakukan penghematan —ditambah dukungan pranata lokal yang masih fungsional—,

maka beban kemiskinan dan krisis yang ditanggung responden terasa agak berkurang. Cuma, masalahnya sekarang: sejauhmana keluarga miskin ini tetap mampu bertahan hidup dan keluar dari krisis jika penderitaan yang mesti mereka tanggung ternyata tak kunjung usai?

Per teori dan dalam praktek, mekanisme subsistensi memang terbukti

fungsional sebagai salah satu cara menyiasati krisis. Tetapi, yang namanya daya tahan dan kemampuan keluarga miskin menghadapi situasi krisis bagaimana pun tetap akan ada batasnya, sehingga tanpa ada program-program intervensi yang benar-benar efektif, niscaya keluarga-keluarga miskin di pedesaan akan makin terpuruk.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrisond,. *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Baswir, Revrisond, dkk,. *Pembangunan Tanpa Perasaan, Evaluasi Pemenuhan Hak Sosial-Ekonomi Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IDEA dan ELSAM, 1999).
- Bakhit, Izzedin (ed.),. *Menggempur Akar-Akar Kemiskinan* (Jakarta: Yakoma-PGI, 2001).
- Basri, Faisal,. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Chambers, Robert,. *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Chaniago, Adrinof A.,. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001).
- Christina, dkk.,. *Jaman Daulat Rakyat: Dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi* (Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama, 2001).
- Dewanta, Awan Setya dkk.,. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1995).
- Emmerson, Donald K.,. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan The Asia Foundation Indonesia, 2001).
- Goldthorpe, J.E.,. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Gilbert, Alan & Josef Gugler,. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996).
- Husken, Frans, Mario Putten, Jan-Paul Dirkse (eds.),. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di Bawah Orde Baru* (Jakarta: Kerjasama Perwakilan KITLV dan Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997).
- Ida, Laode,. *Otonomi Daerah Dalam Interaksi Kritis Stakeholders* (Jakarta; Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK), 2002).

- Rachbini, Didik J. (ed.), *Negara dan Kemiskinan di Daerah* (Jakarta: Sinar Harapan, 1995).
- Suyanto, Bagong, *Kemiskinan dan Kebijakan Pembangunan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1996).
- Suyanto, Bagong (ed.), *Problem Kemiskinan dan Upaya Pengentasannya* (Surabaya: Airlangga University Press, 1995).
- Suyanto, Bagong dan Karnaji, *Pengkajiaan dan Pengembangan Implementasi GERDUTASKIN Di Desa Pantai dan Rural di Jawa Timur* (Surabaya: Lutfansa Mediatama, 2000).
- Suyanto, Bagong & Karnaji, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Struktural Pada Masyarakat Nelayan Tradisional Jawa Timur* (Surabaya: Lutfansa Mediatama, 2004).
- Suyanto, Bagong dan Karnaji, *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005).
- Suyanto, Bagong dan Karnaji, *Penyusunan Rencana Induk Pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya* (Surabaya: Lutfansa Mediatama, 2001).
- Soegijoko, Budhy Tjahjati S dan BS Kusbiantoro, *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1997).
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Bina Rena Pariwisata, 1987).
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS* (Jakarta: Gramedia, 1999).
- Simanungkalit, Salomo (ed.), *Indonesia Dalam Krisis (1997-2002)* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002).
- Widianarko, Budi & Andreas Pandingan (eds.), *Mengurai Belitan Krisis, Rebungan Dari Bendan Dhuwur* (Yogyakarta: Kanisius bekerjasama dengan Universitas Soegijapranata, 2002).